



# *Internal Audit Practice Landscape in Indonesia*

(Common Practices @ ITJEND Kemendikbud)

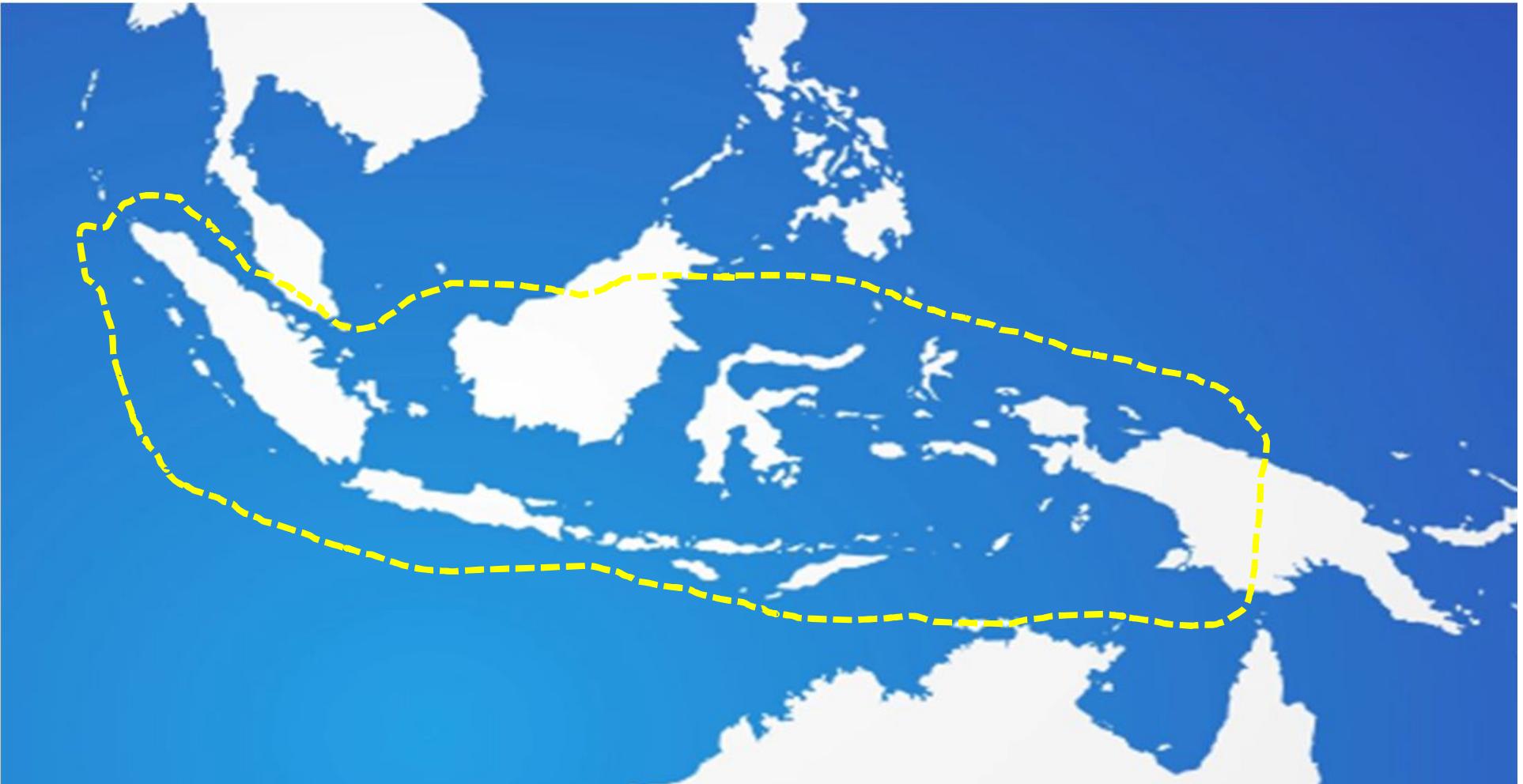
Oleh:

**Daryanto**  
**Irjen Kemendikbud**

Disampaikan dalam acara *2016 IIA Indonesia National Conference*, di Nusa Dua Bali 08 Sep 2016







**368** Satker

PNS/CPNS : 16.419 orang  
Aset Tetap : Rp 8,4 Trilyun



<b>SEKOLAH</b>	<b>213.074</b>
<b>GURU</b>	<b>2.922.535</b>
<b>SISWA</b>	<b>44.791.836</b>

# APBN 2016 (Sebelum revisi penurunan & self blocking)

**Rp.2.095,7 T**



**20% Anggaran Pendidikan**

**Rp.419,18 T**

**34,9%**

(Rp. Triliun)

**Belanja Pemerintah  
Pusat**

1. **Kemdikbud** APBN-P : 43,6  
Selfblock : 39,6

**146,3**

**49,2**

2. Kemristekdikti

**39,5**

3. Kemenag

**46,9**

4. K/L lainnya

**10,7**

**Anggaran Pendidikan melalui  
Pengeluaran Pembiayaan** **(1,2%)**

**5**

**63,9%**

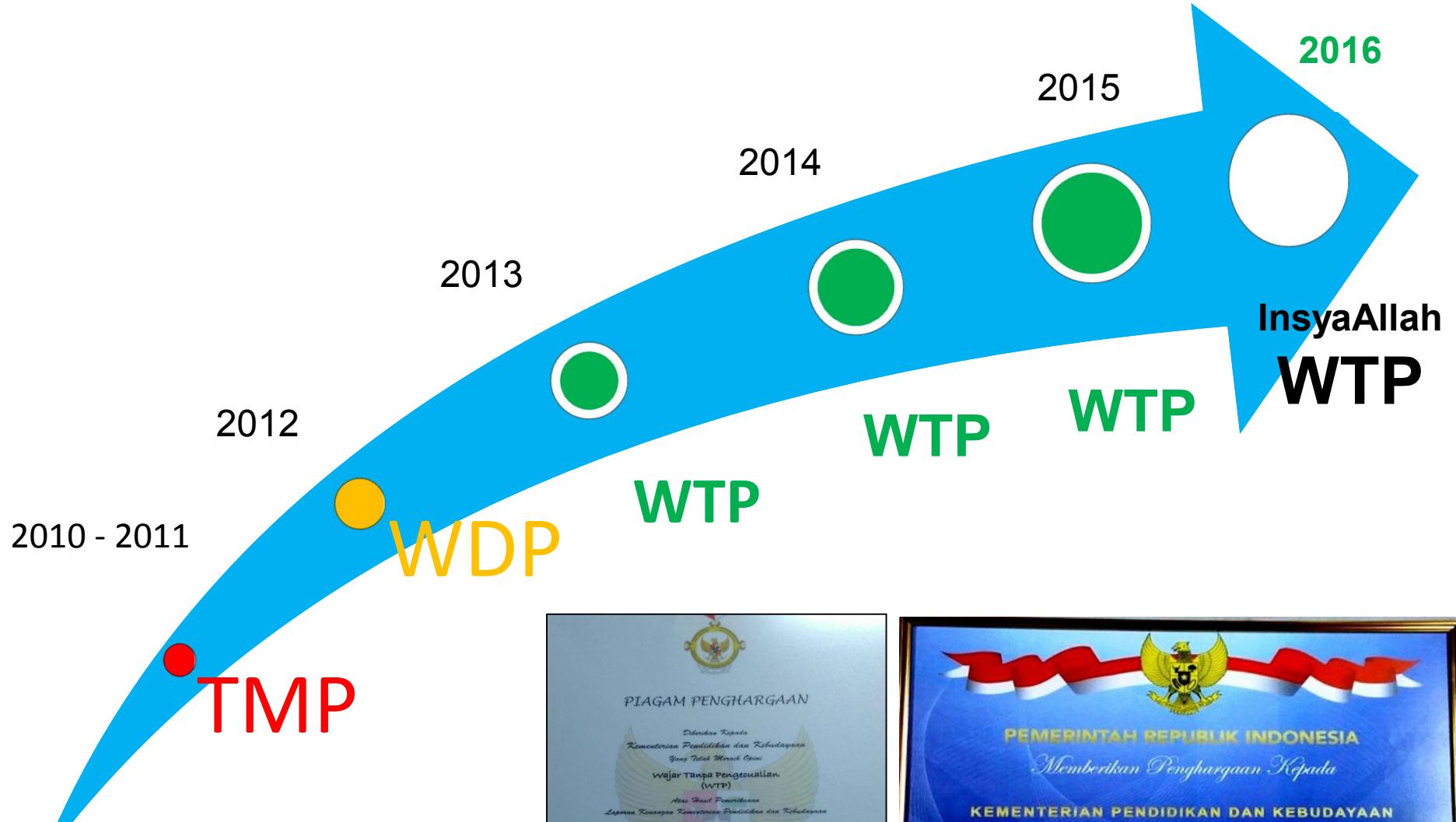
(Rp. Triliun)

**Belanja Transfer Daerah**

**267,9**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. DAU yg diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan | 142,1 |
| 2. DAK Pendidikan                                | 2,6   |
| 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD           | 1,0   |
| 4. Tunjangan Profesi Guru PNSD                   | 71,0  |
| 5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)             | 43,9  |
| 6. BOP PAUD                                      | 2,3   |
| 7. Dana Insentif Daerah                          | 0     |
| 8. OTSUS yg diperkirakan utk Anggaran Pendidikan | 4,7   |

# OPINI LapKeu

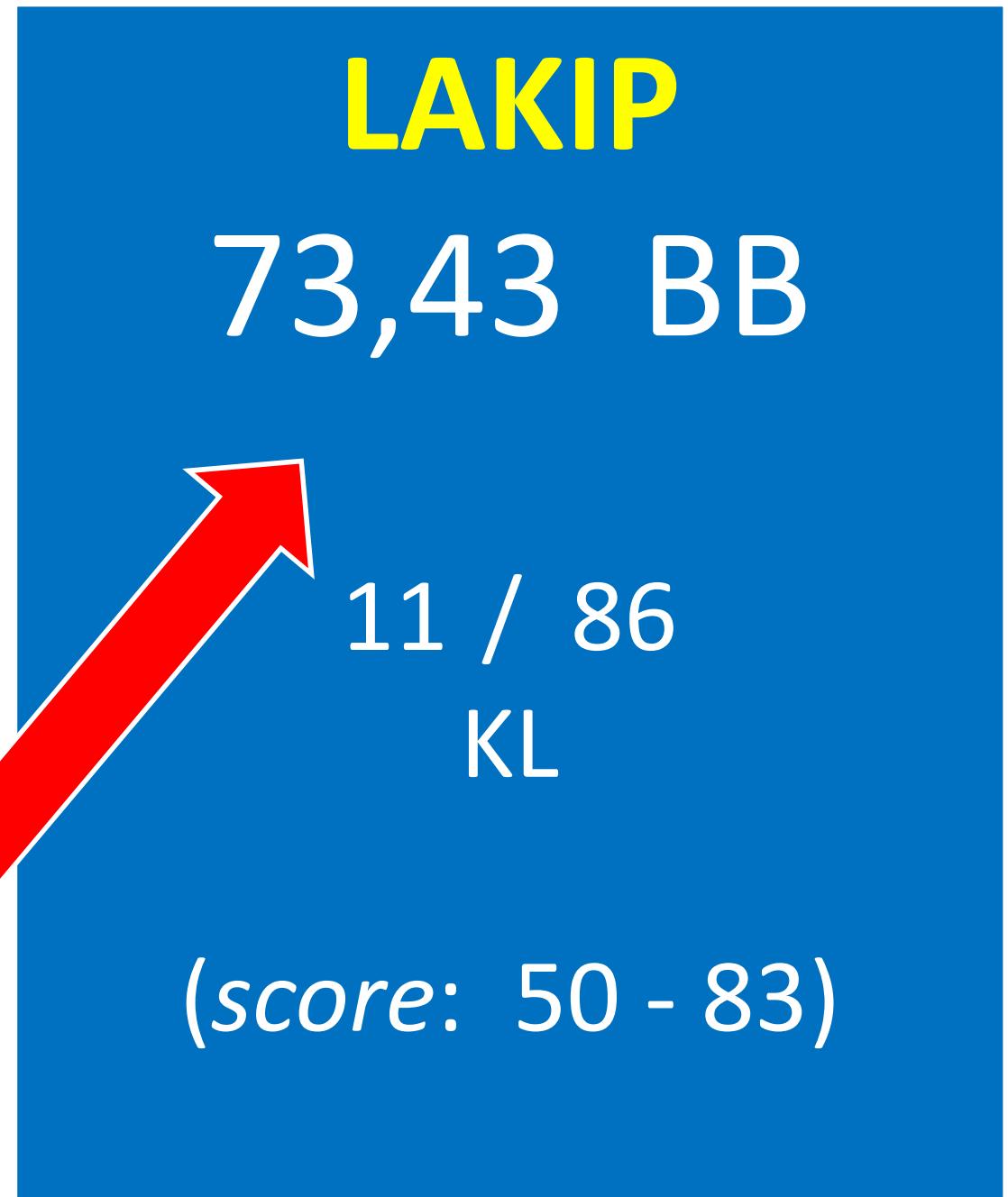


# Pendampingan Peningkatan Kualitas LapKeu K/L



A screenshot of a web browser window showing a list of 11 Indonesian government ministries and their scores from LAKIP. The browser address bar shows "www.menpan.go.id/b". The list includes:

Rank	Ministry / Agency	Score	Grade
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	83.59	A
2	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	80.89	A
3	KEMENTERIAN PERIKANAN	80.76	A
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	80.45	A
5	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	77.54	BB
6	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN BIROKRASI	77.00	BB
7	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	76.13	BB
8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	73.90	BB
9	BADAN PUSAT STATISTIK	73.86	
10	MAHKAMAH KONSTITUSI	73.43	
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73.43	BB



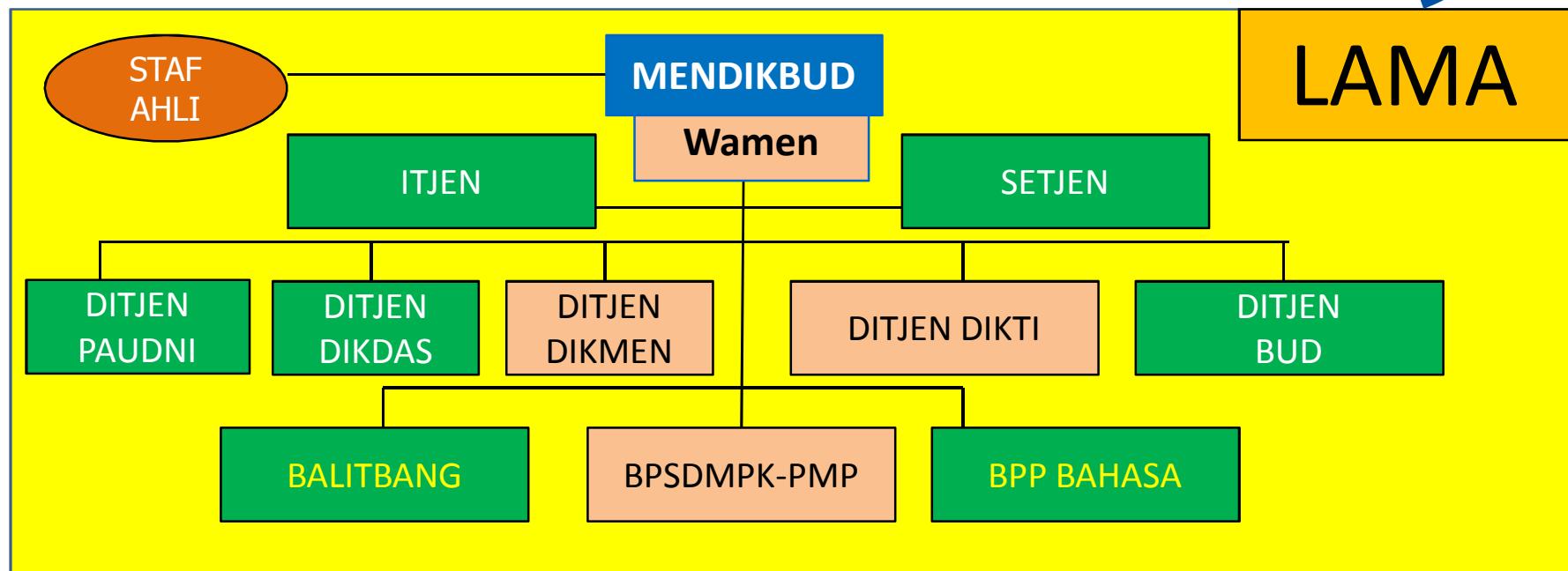
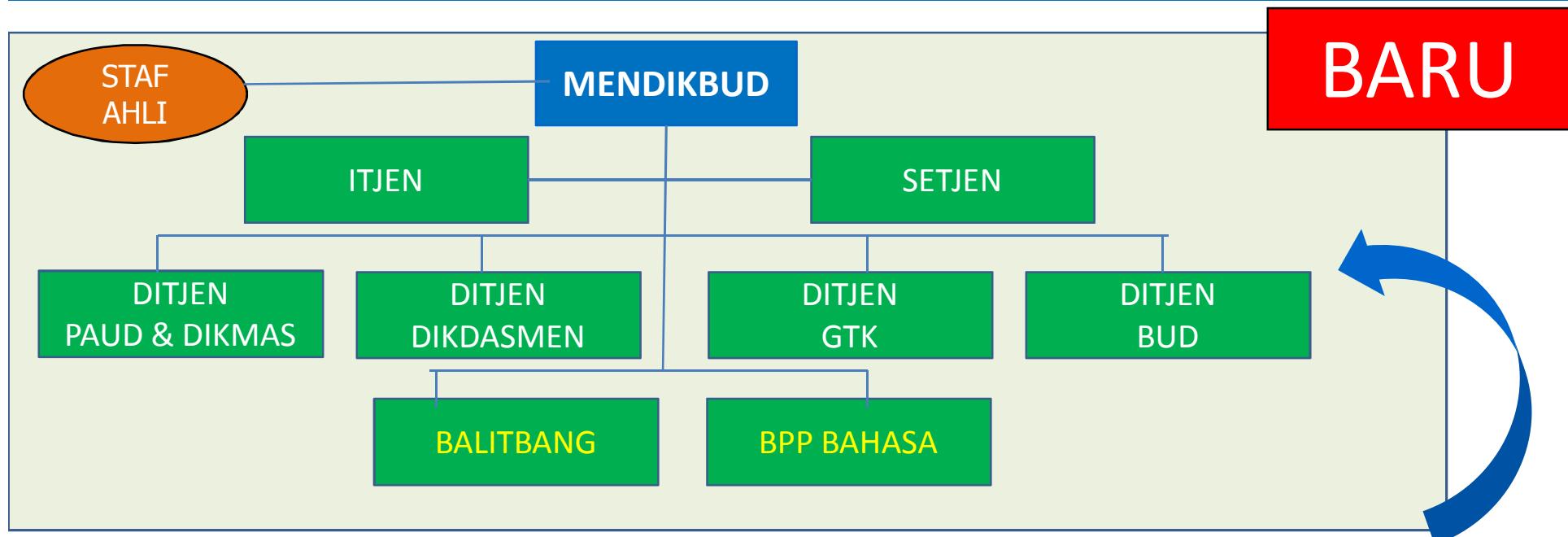
# Penghargaan KPK , 2013 - 2015



**Unit Pengendali  
Gratifikasi (UPG)  
Terbaik**



# Struktur Organisasi KEMENDIKBUD



# Struktur Organisasi ITJEN

Permendikbud  
11 / 2015

Inspektorat Jenderal

Sekretariat

BARU



Permendikbud  
1 / 2012

Inspektorat Jenderal

Sekretariat

LAMA

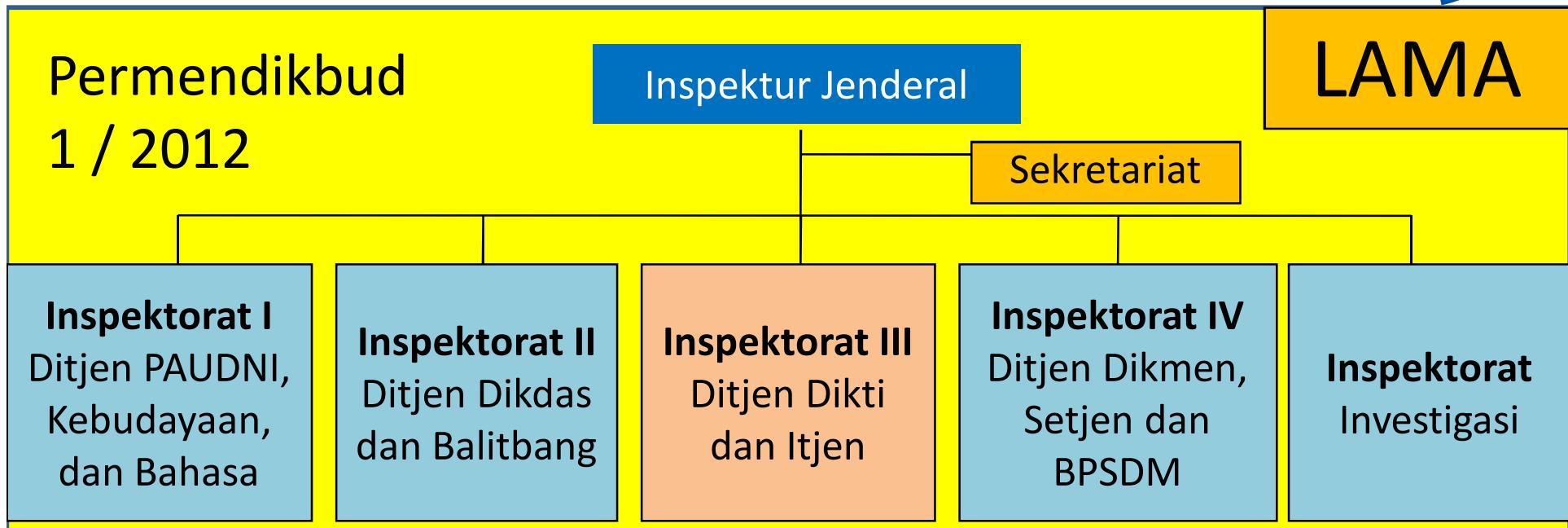
Inspektorat I  
Ditjen PAUDNI,  
Kebudayaan,  
dan Bahasa

Inspektorat II  
Ditjen Dikdas  
dan Balitbang

Inspektorat III  
Ditjen Dikti  
dan Itjen

Inspektorat IV  
Ditjen Dikmen,  
Setjen dan  
BPSDM

Inspektorat  
Investigasi



# Kebijakan Pengawasan

---

1. Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian melalui kegiatan pemeriksaan (**AUDIT**), memberikan PERINGATAN DINI, memberikan jaminan kualitas pelaksanaan TATA KELOLA, memberikan MASUKAN dan KOREKSI kegiatan yg berpotensi menyimpang - sebagai upaya PENCEGAHAN (melalui **pendampingan penyusunan manajemen risiko** dan **audit berbasis risiko**), serta audit INVESTIGASI atas dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya;
2. Mendorong percepatan **TINDAK LANJUT** hasil audit, baik internal maupun eksternal;
3. Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**);
4. Mendorong terwujudnya **TATA KELOLA** Kementerian menuju pemerintahan yang baik (a.l. penguatan **SPIP**);
5. **Peningkatan kompetensi SDM** Itjend dan pemberdayaan Satuan Pengawas Intern (**SPI**) di Satuan Kerja.

# FOCUS : INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019

## 1. KEUANGAN

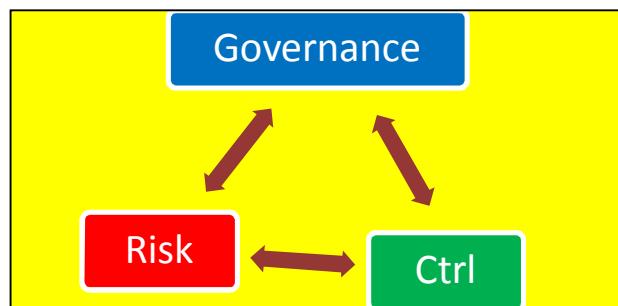
- Opini LK WTP, *Asset Clear*, TL temuan tuntas
- Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award)
- Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit
- Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl
- Maksimalkan *inputting* PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor.

## 2. KINERJA

- Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl
- Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per-UKE I, di-TTD 3 pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, dan Irjend)
- Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert)
- Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan

## 3. RB

- Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE
- Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan (tuntaskan layanan karya siswa).
- Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (*Comm skill, business process, regulasi*)
- Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemdikbud pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!).



## MITRA:

BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; AAIFI (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind, YPIA , LSM & PERS/Media.

# **1. KEUANGAN**

- Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas
- Prinsip *Zero Findings*, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award)
- *Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA)*, Psikologi Audit
- Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan *Risk & Ctrl*
- Maksimalkan *inputing* PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas *Vendor, Cashless payment.*

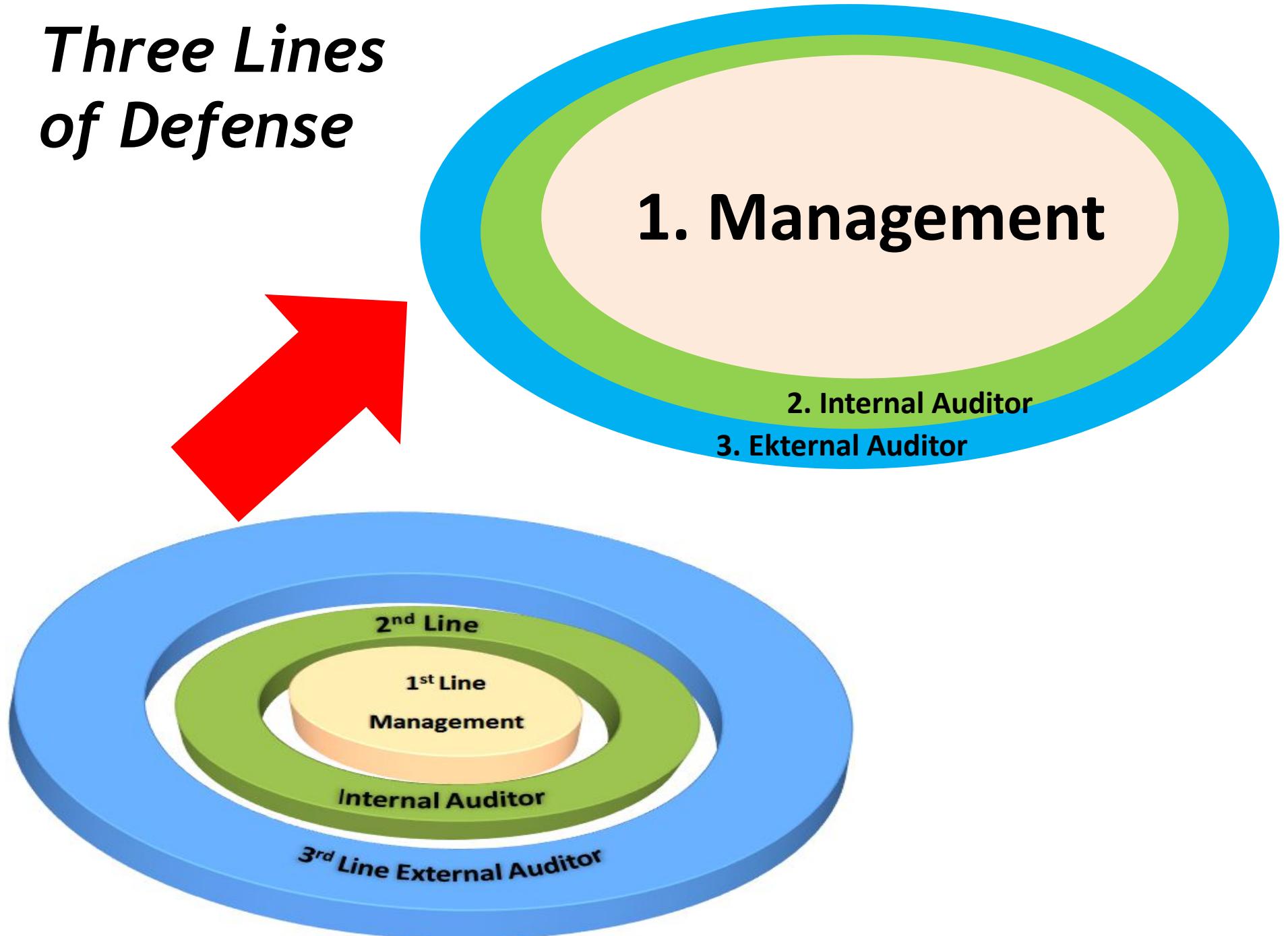
# **2. KINERJA**

- Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan *Risk & Ctrl*
- Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per-UKE I, di-TTD 3 pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, dan Irjend)
- Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert)
- Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum, Biro Keuangan, Satker, dsj.

# **3. RB**

- Kawal area perubahan (di semua lini) dan manfaatkan PIC – UKE,
- Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan (tuntaskan layanan karya siswa).
- Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (*Comm skill, business process, regulasi*)
- Bantu yakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemendikbud pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!).

# *Three Lines of Defense*



# PP 60/2008 = SPIP



# KEMITRAAN

## APARAT PENGAWASAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

## APARAT PENEGAK HUKUM



Inspektorat Jenderal Kementerian,  
Provinsi, Kabupaten/Kota

## LEMBAGA/ PIHAK LAIN



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA



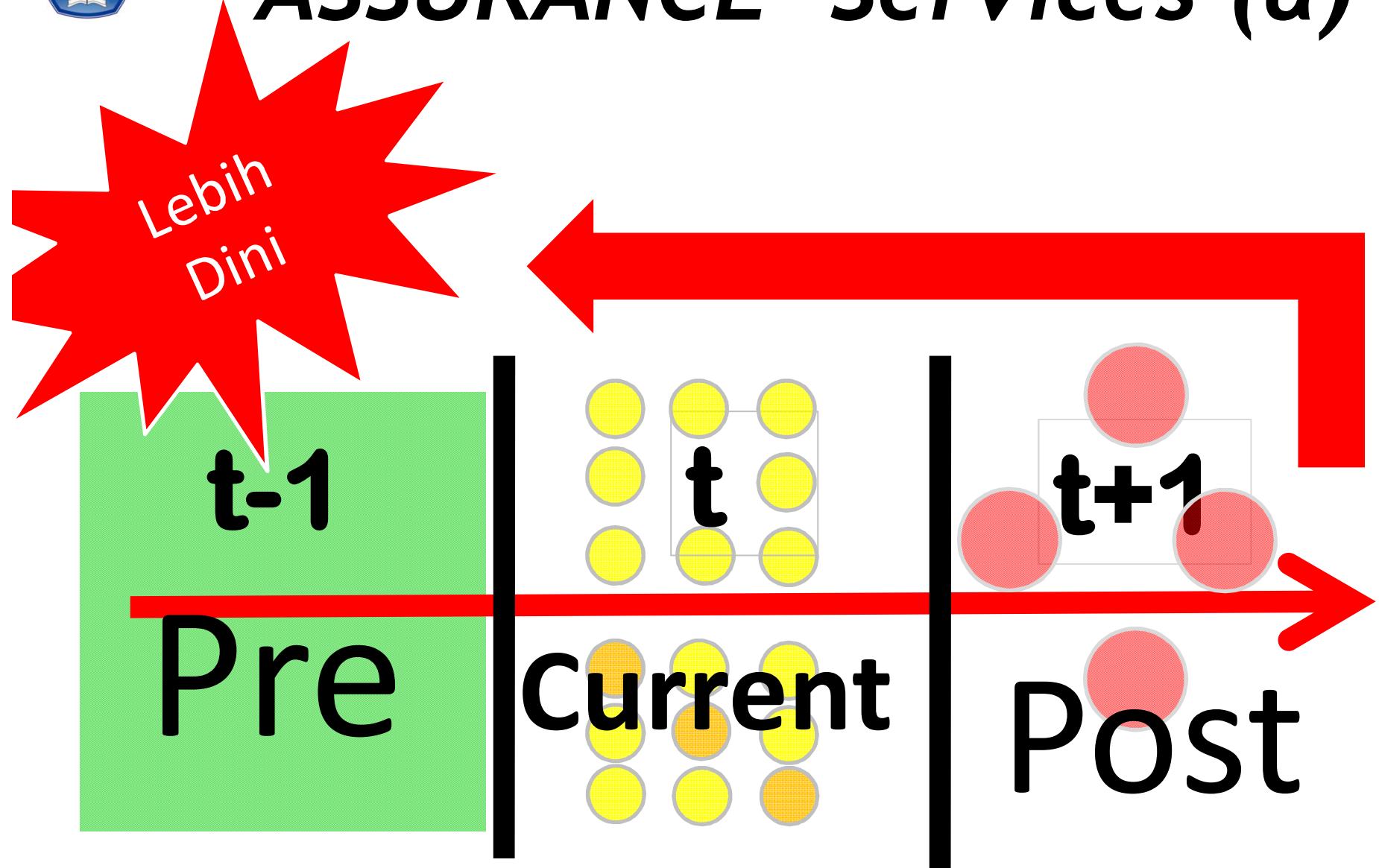
Dan lain2

# Internal Audit Process





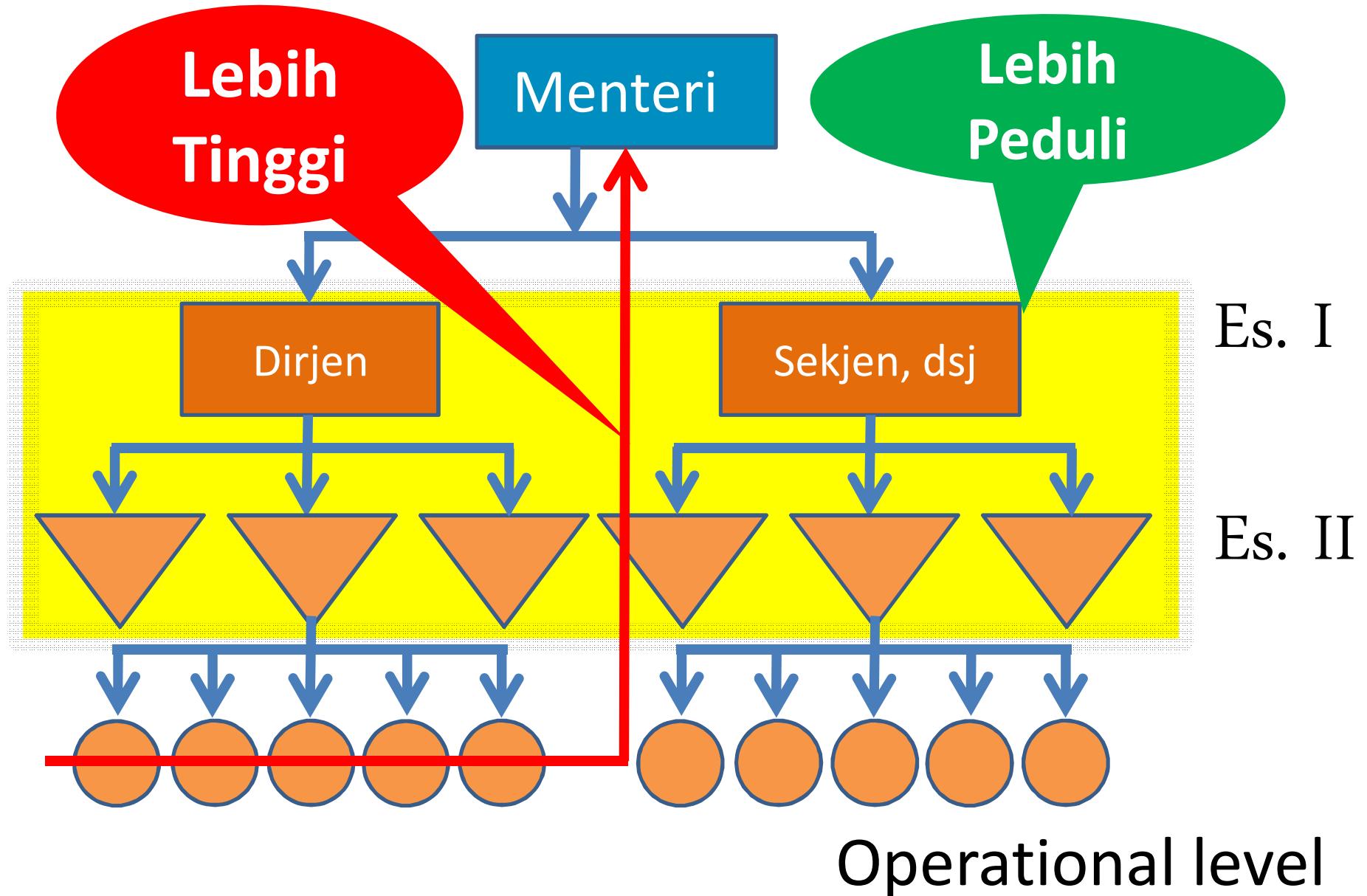
# ASSURANCE Services (a)



*Assurance:* 1) Audit, 2) Review, 3) Evaluation, 4) Monitoring



# ASSURANCE Services (b)



# AUDIT CHARTER





# WORKSHOP KOMITE, TUNAS, DAN SISTEM INTEGRITAS ESelon I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 23 Desember 2014



## KOMITMEN BERSAMA

SELURUH PEMIMPIN UNIT UTAMA ESelon 1 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MELAKUKAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN TERHADAP TUNAS INTEGRITAS PADA MARING – MARING UNIT KERJANYA DAN MENJADI ROLE MODEL.
2. MENDUKUNG TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
3. MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

1. Sekretaris Jenderal

Prof. Ainun Naim, Ph.D

2. Plt. Direktur Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini,  
Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad, M.Sc, Ph.D

3. Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar

Hamid Muhammad, M.Sc, Ph.D

4. Direktur Jenderal  
Pendidikan Menengah

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng

5. Plt. Direktur Jenderal  
Pendidikan Tinggi

Prof. Ainun Naim, Ph.D

6. Direktur Jenderal  
Kebudayaan

Prof. Kacung Marijan, Ph.D

7. Inspektur Jenderal

Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc

8. Kepala Badan Penelitian  
dan Pengembangan

Prof. Dr. Firdaus

9. Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa

Prof. Dr. Mahsun

10. Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pendidikan  
dan Kebudayaan dan Penjaminan  
Mutu Pendidikan

Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd

**KESEPAKATAN AKSI BERSAMA  
PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN  
TAHUN 2015**

Dalam rangka pencegahan korupsi dana pendidikan, maka telah disepakati aksi bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut:

No	AKSI BERSAMA	PELAKSANA
1.	Melakukan program pencegahan korupsi di Kementerian pengelola dana pendidikan dan instansi terkait di daerah	KPK (Koord), Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
2.	Melakukan kajian terkait sistem pengelolaan dana pendidikan	KPK (Koord), Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag, Kemkeu, BPKP
3.	Menyempurnakan aturan pengelolaan dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag, Kemkeu, Kemdagri, BPKP
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi dana pendidikan pada: a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kemdikbud (Koord), Kemdagri, KPK, BPKP
	b. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kemristek Dikti (Koord), KPK, BPKP
	c. Kementerian Agama	Kemenag (Koord), KPK, BPKP
5.	Menyempurnakan dan mengintegrasikan sistem informasi pendataan pendidikan nasional pada masing-masing Kementerian pengelola dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
6.	Menyempurnakan dan mengintegrasikan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Kementerian pengelola dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
7.	Meningkatkan kompetensi audit dari Inspektorat Daerah dalam mengawasi dana pendidikan	Kemdagri (Koord), Kemdikbud, BPKP
8.	Sosialisasi kewenangan pengawasan dana pendidikan pada Pemerintah Daerah	Kemdagri

Jakarta, 15 Desember 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Anies R. Baswedan)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(M. Nasir)

Menteri Agama

(Lukman Hakim Saifuddin)

Menteri Dalam Negeri

(Ijahjo Kumolo)

Menteri Keuangan

(Bambang P.S. Brodjonegoro)

Plt. Kepala BPKP

(Meidyah Indreswari)

Ketua KPK

(Abraham Samad)



# Peraturan MENTERI Utk Penguatan Tata kelola





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Inspektorat Jenderal

# PETA RESIKO

&

## Kegiatan Pengendalian

(Risk Maps & Control Activities)

Sekretariat Itjen

2015

Disusun dalam rangka penguatan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbud

# PETA RISIKO

DAN

## KEGIATAN PENGENDALIAN

(Risk Map & Control Activities)



## Kegiatan-Kegiatan Upaya Pencegahan Korupsi





# PENCANANGAN ZI-WBK

di LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

Plaza Insan Berprestasi, 6 Oktober 2015



# I. Capaian

- **Opini (WTP)** – BPK RI, 3 Th berturut-turut / LK 2013 , 2014, & 2015;
- **LAKIP** 2014 = 73,43 BB=Sangat Baik, ranking 11 dari 86 K/L;
- **UPG TERBAIK** – KPK, 3 tahun berturut-turut, 2013, 2014 & 2015;
- **Stand TERFAVOURIT** pd Kampanye Anti Korupsi dari KPK, th 2015;
- Kepatuhan **LHKPN** 99% (2.239 dari 2.272 wajib lapor) Des 2015 – B1 ;
- Kepatuhan **LHKASN** 87% (12.078 dari 13.893 wajib lapor);
- **Tunas Integritas** = 140 org ; Eselon IV s.d. I di 8 unit utama;
- Diseminasi **WBK** di 31 provinsi, 3.100 orang, hadir 2.953 orang (95,3%);
- Diseminasi **profil fraud** (30 Prov, 1.240 orang);
- **Mengawal RB** hingga mencapai nilai **70,79** (peringkat 2 dari 22 K/L)
- Tercanangkan **ZI-WBK** , 6 Oktober 2015
- **Tindak Lanjut Temuan** (BPK-RI,BPKP, dan Itjen) **signifikan**, dan selesai antara 80 s.d. 85 %.
- **Pegaduan** ditangani 95% (817 dari 861 kasus)
- Penguatan kompetensi Auditor (**Sertifikasi** QIA, Cfra)
- **Consulting & Advisory** services
- Penyelesaian Hambatan & Persoalan lapangan (**Trouble Shooter**)

# *Intangible performance...*

- Komunikasi ke *auditee* semakin baik
- *Trust* mitra kerja semakin kuat
- Kesadaran *Governance* meningkat
- Semangat saling dukung makin kuat
- Kredibilitas semakin baik
- Peran & keberadaan **ITJEN** mulai dibutuhkan

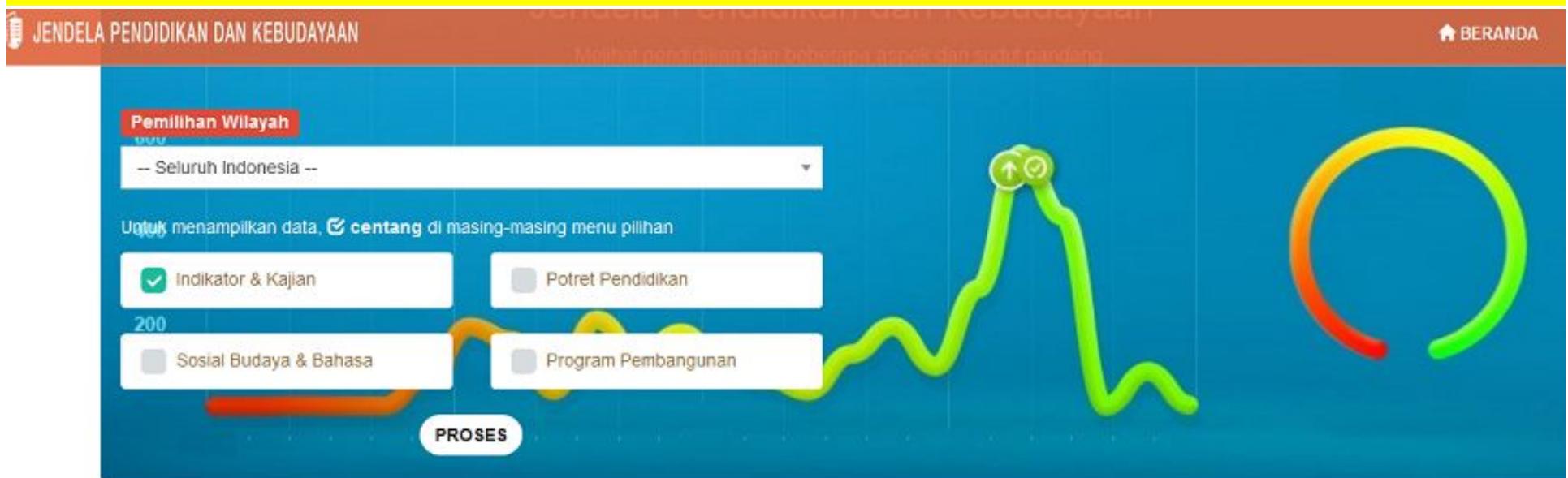


# Unit Layayan Terpadu (ULT)

# PORTAL

## Jendela Pendidikan & Kebudayaan

<http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/>



## II. Kendala

1. Keterbatasan **SDM**, baik kualitas maupun kuantitas;
2. Luasnya **Cakupan** sasaran audit yg sangat besar dan wilayahnya menyebar di seluruh pelosok Indonesia;
3. Terjadinya **Reorganisasi** yg memerlukan penyesuaian ritme kerja;

# SIMPULAN

Lebih DINI

Lebih TINGGI

Lebih PEDULI





# TERIMA KASIH

